

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di era global saat ini menuntut kemajuan di berbagai sektor telah menjadikan bank sebagai salah satu industri yang paling penting dalam menjalankan roda dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang telah mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat, khususnya sejak Pemerintah Indonesia menggalakkan deregulasi dan debirokratisasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan sejak Juni 1983. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mendorong peningkatan kebutuhan yang mendesak terhadap dana investasi yang harus dipenuhi baik secara langsung maupun melalui perbankan sebagai perantara keuangan.

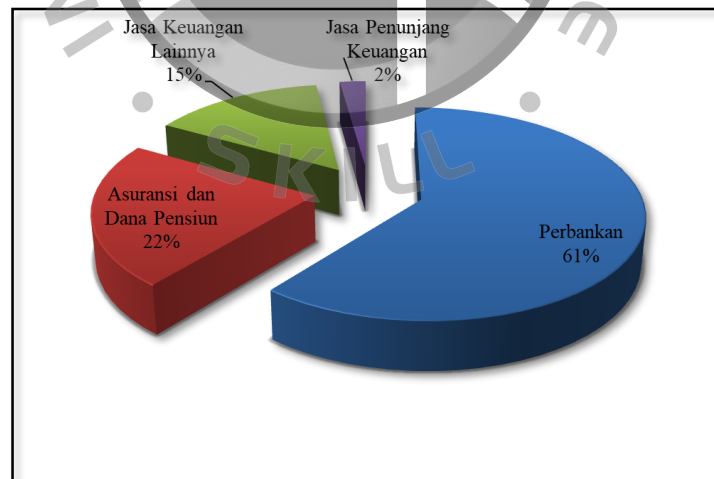
Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat semakin meningkat khususnya sejak Pemerintah melalui Bank Indonesia resmi mengeluarkan Paket Oktober 1988. Paket Oktober 1988 merupakan rangkaian dari kebijakan deregulasi yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1983 yaitu Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 1992.

Undang-undang tersebut mengatur sebagai berikut :

- a. Struktur perbankan
- b. Syarat pendirian bank
- c. Ruang lingkup kegiatan
- d. Peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan
- e. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank serta peningkatan profesionalisme.

Industri perbankan berperan sebagai urat nadi perekonomian Indonesia, terutama fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bahkan dalam kontribusinya sebagai lembaga keuangan, industri perbankan memberi kontribusi PDB terbesar dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Gambar 1.1
Kontribusi PDB Industri Perbankan pada sektor
Lembaga Keuangan Tahun 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa industri perbankan mendominasi kontribusi PDB pada sektor lembaga keuangan. Oleh karena itu, industri perbankan menjadi tumpuan bagi perekonomian Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, kompleksitas transaksi perbankan semakin bertambah dan tingkat risiko yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jenis dan macam transaksi yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Selain itu, tingkat kejahatan manusia serta teknologi yang semakin maju terus menerus mencari celah-celah yang dapat diambil keuntungan secara pribadi oleh pihak-pihak tertentu, oleh karena itu sangat penting bagi pihak manajemen untuk terus melakukan kajian terhadap kegiatan operasional berbanding dengan risiko yang timbul dari adanya kegiatan tersebut.

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam menangani masalah manajemen risiko perbankan. Selanjutnya keseriusan ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah sampai tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan menjadi No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang menunjukkan

keseriusan Bank Indonesia dalam meminta manajemen perbankan untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*.

Pentingnya permodalan bagi suatu bank tidak hanya secara individu tetapi juga untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Oleh karena itu maka pengaturan mengenai permodalan mengacu kepada suatu Standard Internasional yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*. Standar yang dikenal dengan Basel I ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1988 yang dalam perjalanan waktu banyak mengalami penyesuaian sebagai konsekuensi berkembang pesatnya instrumen di pasar keuangan. Sampai dengan akhirnya, disepakati untuk menetapkan suatu standar perhitungan permodalan bank yang lebih sensitif yang dikenal dengan Basel II.

Lebih jauh lagi, kinerja perusahaan dipengaruhi oleh komitmen manajemen. Komitmen manajemen menggambarkan bagaimana manajemen secara konsisten menetapkan strategi dalam proses mencapai tujuan yang diharapkan (Setiawati, *et al*, 2017: 965). Meningkatkan efektivitas kerja karyawan merupakan dampak positif lain dari terbangunnya komitmen (Rahayu, 2010:11). Ditambahkan oleh Luckyta dan Pratiwi (2012:30) komitmen memiliki kontribusi lebih aktif bila dibandingkan dengan loyalitas, seorang karyawan yang berkomitmen akan menunjukkan kerja yang lebih dari seorang yang loyalitasnya tinggi. Karyawan akan membangun sikap yang positif dan berkomitmen terhadap organisasi ketika organisasi menunjukkan komitmennya terhadap karyawan.

Selanjutnya, terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya (*gap research*) terkait pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.

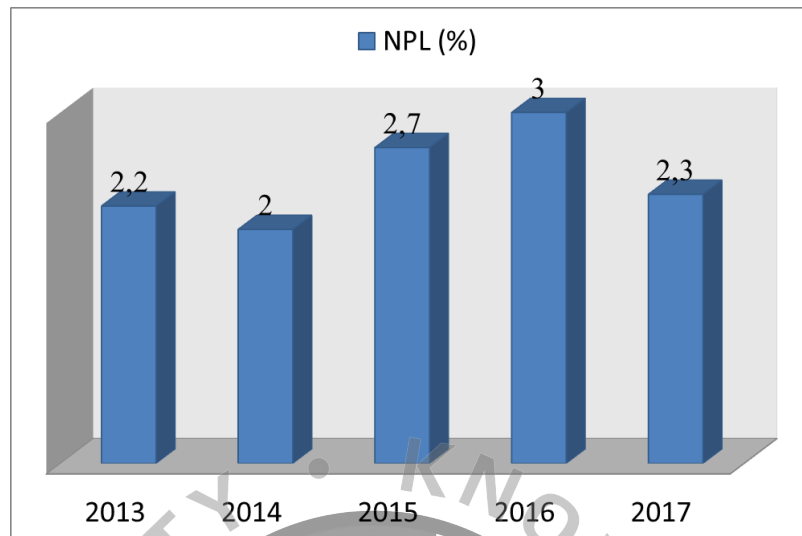
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiawaty (2016) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap penerapan manajemen risiko. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Abdul (2016) bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Abdul (2016) menyatakan bahwa penerapan Basel memberikan pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko pada perbankan Indonesia. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maski (2011) yang menunjukkan bahwa penerapan Basel tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Manajemen Risiko Perbankan Indonesia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Basel, *Good Corporate Governance* (GCG) serta komitmen manajemen menjadi perhatian bagi BNI. Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang sempat mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2016 yaitu sebagai berikut.

Gambar 1.2 Kinerja Rasio *Non Performing Loan* (NPL)

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Sumber: Annual Report BNI (2018)

Berdasarkan Gambar 1.2, diketahui bahwa BNI mengalami kenaikan NPL selama 2 (dua) Tahun berturut-turut pada 2015 dan 2016. Meskipun kembali turun pada 2017 namun hal tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit yang terdapat pada BNI tetap menjadi perhatian manajemen. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan Bank Tbk terbesar keempat di Indonesia, sehingga tidak boleh ada peluang kerugian, oleh karena itu Manajemen Risiko menjadi tulang punggung bagi operasional Bank.

Berdasarkan uraian berserta *gap research* di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Basel II, *Good Corporate Governance*, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat fluktuasi kinerja *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bahkan mengalami kenaikan selama Tahun 2015 dan 2016 yang menunjukkan adanya potensi risiko kredit pada BNI. Hal tersebut menunjukkan perlunya penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* (GCG) serta komitmen manajemen sebagai instrumen tercapainya manajemen risiko pada BNI.
2. Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu (*gap research*) terkait pengaruh penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Manajemen Risiko perusahaan perbankan di Indonesia sehingga diperlukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai manajemen risiko PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Basel II terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?
2. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?
3. Seberapa besar pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?

4. Seberapa besar pengaruh Basel II, *Good Corporate Governance*, dan Komitmen Manajemen secara bersama-sama (simultan) terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ?

1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dan membatasi ruang lingkup penelitian pada masalah yang pokok. Pembatasan masalah dapat ditulis sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada pegawai Kantor Pusat dan Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penelitian hanya dilakukan pada karyawan level Asisten Manager dan Manager pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.5 Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan Basel II terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?
2. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?
3. Seberapa besar pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?
4. Seberapa besar pengaruh Basel II, *Good Corporate Governance*, dan Komitmen Manajemen secara bersama-sama (simultan) terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Basel II terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Basel II, *Good Corporate Governance*, dan Komitmen Manajemen secara bersama-sama (simultan) terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.7 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pengaruh Basel II, Komitmen Manajemen, dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap sejauh mana pelaksanaan manajemen risiko di PT Bank Negara Indonesia Tbk.